

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi SKPD.....	1
1.2 Struktur Organisasi SKPD.....	17
BAB II PERJANJIAN KINERJA ESELON II	
2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	18
2.2 Lampiran Pernyataan Perjanjian Kinerja Eselon II.....	19
BAB III PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III	
3.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sekretaris.....	20
3.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Politik Dalam Negeri.....	22
3.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.....	24
3.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan.....	26
3.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kabid Kewaspadaan Nasional.....	28
BAB IV PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV/SUB KOORDINATOR	
4.1 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian.....	30
4.2 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Analis Keuangan Pusat dan Daerah.....	32
4.3 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Perencanaan.....	34
4.4 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Fasilitas Organisasi Politik.....	36
4.5 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pendidikan Budaya Politik.....	38
4.6 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Pembauran dan Kewarganegaraan.....	40
4.7 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.....	42
4.8 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.....	44
4.9 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kepercayaan.....	46
4.10 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.....	48
4.11 Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Sub Koordinator Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.....	50
BAB V PENUTUP	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 04 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 18 September 2019 Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

2. Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumus kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019, sebagai berikut:

- 1. Kepala;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Program dan Anggaran.
- 3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- 4. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- 5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.



6. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
 - b. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh **Drs. MUHAMMAD FIRSADA, M.Si** yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

1. Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksana kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksana koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intra suku, muat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial diwilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan



ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku, intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan pengamanan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik; dan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur.

2. Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokoknya **Sekretaris**, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan aset serta pengelolaan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan persuratan;
- 2) Melaksanakan urusan tata usaha pimpinan;
- 3) Melaksanakan urusan kearsipan;
- 4) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan protokol;
- 6) Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- 7) Melaksanakan urusan pengelolaan aset;
- 8) Melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan aset, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan urusan pengelolaan keuangan;
- 2) Melakukan urusan penatausahaan keuangan dan aset;
- 3) Melaksanakan pelaporan aset/barang inventaris;
- 4) Melakukan urusan akuntansi;
- 5) Melakukan urusan verifikasi dan pembukuan;
- 6) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Program dan Anggaran

Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- 2) Melaksanakan penyiapan pengelolaan data informasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan penyusunan laporan kinerja;
- 5) Menyiapkan laporan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan



pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Politik Dalam Negeri***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan



penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Rincian tugas Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

Rincian tugas Sub-Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas sebagai berikut :



- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- 6) melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

Dalam melaksanakan tugasnya ***Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa***, mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- b. Perumus kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bhineka tunggal ikadan sejarah kebangsaan di wilayah provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa,
membawahi :

1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;



- 5) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Rincian tugas Sub-Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang bela negara,pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakterbangsa;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang belanegara, pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dankarakter bangsa;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang bela negara,pembauran, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakterbangsa; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan OrganisasiKemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan



Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya ***Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan***, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah provinsi; dan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



***Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan, membawahi :***

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat



beragama dan penghayatan kepercayaan daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi; dan

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Rincian tugas Sub-Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi :

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Rincian tugas Sub-Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 5) Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing,



tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan;

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Penanganan Konflik.

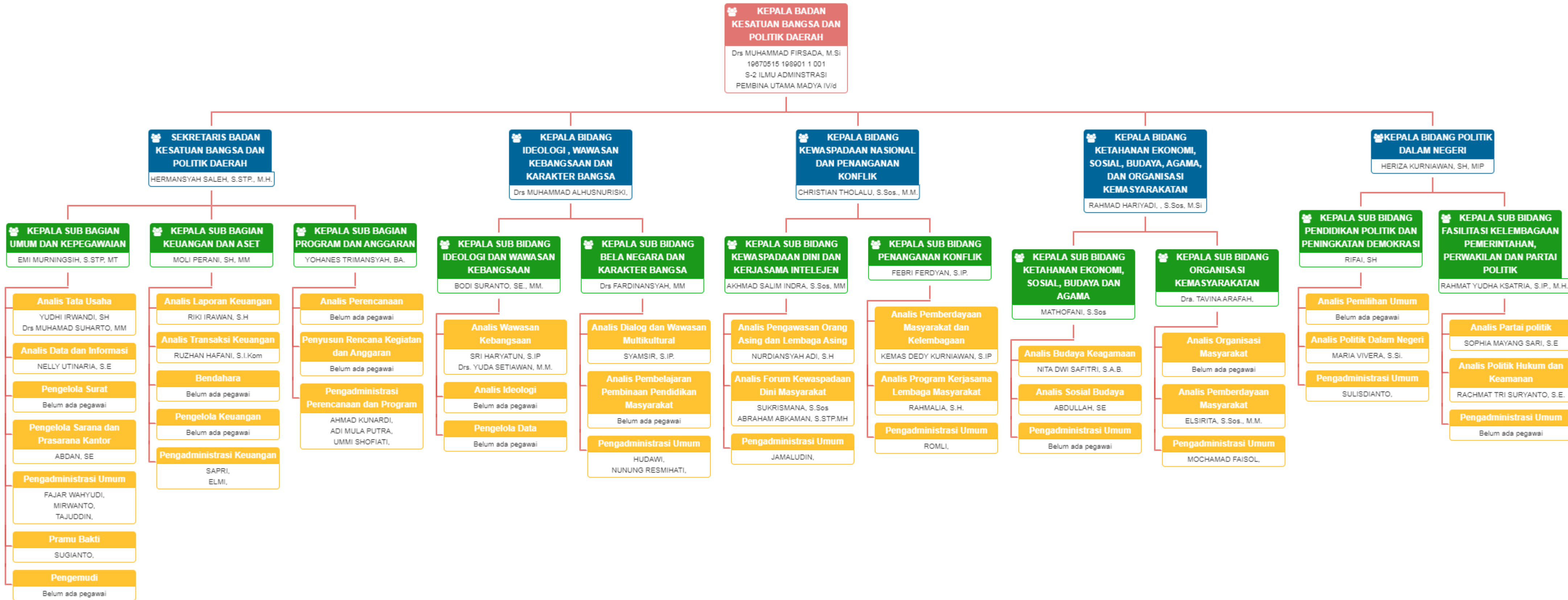
Sub-Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

Rincian tugas Sub-Bidang Penanganan Konflik adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 3) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang penanganan konflik;
- 5) Melaksanakan penyiapan penanganan konflik;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.

Masing-masing bagian atau bidang merupakan sub system dari organisasi Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung yang saling berkaitan dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta keterpaduan dan sinergi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Keterkaitan dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.



BAB II

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

ESELON II



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. M. FIRSADA, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	Prosentase menurunnya potensi konflik sosial tidak menjadi peristiwa konflik sosial setiap tahunnya di Provinsi Lampung	80%
2.	Peningkatan kehidupan demokrasi yang menghormati kearifan lokal dan etika politik	prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih	72.25

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN		KETERANGAN
(1)		(2)		(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp.	16,298,283,377.15	P APBD
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	143,918,500.00	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	14,178,439,837.15	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	23,368,000.00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	19,910,000.00	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	1,287,552,700.00	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	403,414,340.00	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	241,680,000.00	
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1,019,837,800.00	P APBD
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1,019,837,800.00	
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp.	516,799,000.00	P APBD
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Rp.	516,799,000.00	

4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	188,433,000.00	P APBD
4.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	188,433,000.00	
5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	1,214,593,000.00	P APBD
5.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp.	1,214,593,000.00	
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	1,243,822,600.00	P APBD
6.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Rp.	1,243,822,600.00	

Total **Rp. 20,481,768,777.15**

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

BAB III

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II DENGAN ESELON III



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA**

Drs. FARDINANSYAH, M.Si
Pembina
NIP. 19680103 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI**

HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
Pembina
NIP. 19780710 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA, DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN
ORMAS**

RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si
Pembina
NIP. 19670107 198909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**

CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710213 199703 1 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. M. FIRSADA, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

Drs. M. FIRSADA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670515 198901 1 001

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG IDEOLOGI, WASBANG DAN KARAKTER BANGSA

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	25%

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WASBANG DAN KARAKTER BANGSA**

Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

Drs. FARDINANSYAH, M.Si
PEMBINA
NIP. 19680103 199603 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG KETAHANAN EKOSOS, BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	prosentase lembaga dan ormas aktif dalam ketahanan sosial dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung	25%
2	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	prosentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	25%

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG KETAHANAN EKOSOS,
BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19670107 198909 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	prosentase koordinasi, pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	85%

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19710213 199703 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan etika serta budaya politik	prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Lampung	72.5%

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua ,

KEPALA BADAN



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG
POLITIK DALAM NEGERI**



HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
PEMBINA
NIP. 19780710 200501 1 012

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIDANG SEKRETARIAT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan urusan tata usaha dan aset, humas dan protokol, penyusunan program anggaran dan pengelolaan keuangan	Prosentase pemenuhan dokumen pelayanan urusan tata usaha dan aset, humas dan protokol, penyusunan program anggaran dan pengelolaan keuangan tepat waktu	100%

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN

SEKRETARIS



Drs. M. FIRSADA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670515 198901 1 001

HERMANSYAH S., SSTP, MH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

BAB IV

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III DENGAN ESELON IV



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BAGIAN BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. FARDINANSYAH, M.Si**
Jabatan : **Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI
WASBANG DAN KARAKTER
BANGSA**


Drs. FARDINANSYAH, M.Si
Pembina
NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BIDANG BELA NEGARA DAN
KARAKTER BANGSA**


Drs. FARDINANSYAH, M.Si
Pembina
NIP. 19680103 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MATHOFANI, S. Sos**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA DAN AGAMA**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORMAS**


RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670107 198909 1 001

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**


MATHOFANI, S. Sos
Penata Tk. I
NIP. 19830528 200112 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. TAVINA ARAFAH**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,
BUDAYA, AGAMA DAN ORMAS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORMAS**

**SUB KOORDINATOR ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**


RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670107 198909 1 001


Dra. TAVINA ARAFAH
Penata Tk. I
NIP. 19650412 198603 2 004



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB. BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA
INTELIJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI DAN
KERJASAMA INTELIJEN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710213 199703 1 004

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN
DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN**

AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM
Pembina
NIP. 19690928 198912 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FEBRI FERDYAN, S. IP**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENANGANAN KONFLIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**

CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19710213 199703 1 004

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR PENANGANAN
KONFLIK**

FEBRI FERDYAN, S. IP

Penata

NIP. 19810203 201101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BIDANG PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIFAI, SH**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK
DAN PENINGKATAN DEMOKRASI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
Pembina
NIP. 19780710 200501 1 012

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR PENDIDIKAN
BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN
DEMOKRASI**

RIFAI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19660429 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT YUDHA KSATRIA, S.IP, MH**
Jabatan : **SUB KOORDINATOR FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG POLITIK
DALAM NEGERI**

HERIZA KURNIAWAN, SH, M.IP
Pembina
NIP. 19780710 200501 1 012

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR FASILITASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN,
PERWAKILAN DAN PARPOL**

RAHMAT YUDHA KSATRIA, S.IP, MH
Penata Tk. I
NIP. 19880625 200701 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EMI MURNINGSIH, S.STP., MT**

Jabatan : **KEPALA SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB. BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**

MATHOFANI, S. Sos

Penata Tk. I

NIP. 19661210 198703 1 010



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOHANES TRIMANSYAH**

Jabatan : **SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN ANGGARAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN ANGGARAN

YOHANES TRIMANSYAH

Penata Tk. I

NIP. 19680912 198909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 482201, 481544 Fax (0721) 481544, 481304

TELUKBETUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOLI PERANI, SH, MM**

Jabatan : **ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

MOLI PERANI, SH, MM

Pembina

NIP. 19660713 199201 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KARAKTER BANGSA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	6 dokumen
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	6 dokumen
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	2260 orang
4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa	15 laporan

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

**Plt. KEPALA BIDANG IDEOLOGI,
WAWASAN KEBANGSAAN DAN
KARAKTER BANGSA**



Drs. FARDINANSYAH, M. Si

Pembina

NIP. 19680103 199603 1 003

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR BELA NEGARA
DAN KARAKTER BANGSA**



Drs. FARDINANSYAH, M. Si

Pembina

NIP. 19680103 199603 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	495 orang
2	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 laporan

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA,
AGAMA DAN ORMAS**

**SUB KOORDINATOR ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**




RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19670107 198909 1 001

Dra. TAVINA ARAFAH
Penata Tk. I
NIP. 19650412 198603 2 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUBBID KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Kebijakan Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1370 orang
2	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15 laporan

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, AGAMA
DAN ORMAS**

**SUB KOORDINATOR KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA**


RAHMAD HARIYADI, S. Sos. M.Si
PEMBINA Tk. I
NIP. 19670107 198909 1 001


MATHOFANI, S. Sos
Penata Tk. I
NIP. 19691117 199003 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	6 dokumen
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	1140 orang
3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan	15 laporan
4	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	4 dokumen

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

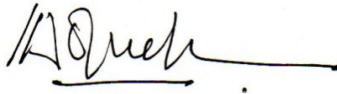
**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN
KONFLIK**



CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19710213 199703 1 004

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR KEWASPADAAN DINI
DAN KERJASAMA INTELIJEN**



AKHMAD SALIM INDRA, S. Sos. MM
Pembina
NIP. 19690928 198912 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB. BIDANG PENANGANAN KONFLIK

No	Sasaran Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	2 dokumen
2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	100 orang
3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Bidang Penanganan Konflik di Daerah	680 orang
4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanganan Konflik di Daerah	15 laporan

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN
NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**

SUB KOORDINATOR PENANGANAN KONFLIK



CHRISTIAN THALOLU, S.Sos. M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 19710213 199703 1 004



FEBRI FERDYAN, S. IP

Penata
NIP. 19810203 201101 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUBBID PENDIDIKAN BUDAYA POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 dokumen
2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Bahan Permusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 dokumen
3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450 orang
4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 laporan

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI**

**SUB KOORDINATOR PENDIDIKAN BUDAYA
POLITIK DAN PENINGKATAN DEMOKRASI**




HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP

RIFAI, SH

Pembina

Penata Tk. I

NIP. 19780710 200501 1 012

NIP. 19660429 199003 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUBBID FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN
PARPOL

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 dokumen
2	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1230 orang
4	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	15 laporan

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



HERIZA KURNIAWAN, SH, M. IP

Pembina

NIP. 19780710 200501 1 012

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARPOL



RAHMAT YUDHA K., S.IP, MH

Penata Tk. I

NIP. 19880625 200701 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB. BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dokumen
2	Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4 dokumen
3	Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	14 dokumen

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS

SUB KOORDINATOR PROGRAM DAN ANGGARAN



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

YOHANES TRIMANSYAH

Pembina Tk. I

Penata Tk. I

NIP. 19760710 199603 1 001

NIP. 19680912 198909 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 org/bulan
2	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	39 dokumen
3	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen
4	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	18 laporan

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt. SEKRETARIS

ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH




HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

MOLI PERANI, SH, MM

Pembina Tk. I

Pembina

NIP. 19760710 199603 1 001

NIP. 19660713 199201 2 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 laporan
2	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 laporan
3	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	181 orang/hari/kegiatan
4	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket
5	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36 paket
6	tersedianya peralatan rumah tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket
7	tersedianya barang cetak dan penggandaan	jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket

Telukbetung, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Plt. SEKRETARIS



HERMANSYAH SALEH, SSTP, MH

Pembina Tk. I
NIP. 19760710 199603 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN**



EMI MURNINGSIH, S.STP., MT

PEMBINA
NIP. 19830528 200112 2 002



BAB V

PENUTUP

VI.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, merupakan implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi.

Pelaksanaan program kerja telah memberikan peningkatan dalam berbagai bentuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022, secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat hambatan namun tidak mengganggu proses pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2022

KEPALA BADAN,

Drs. M. FIRSADA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670515 198901 1 001